

Analisis Fungsi Subbagian Humas Sekretariat Dewan dalam Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh

Analysis of the Functions of the Public Relations Subdivision of the Secretariat of the Council in Improving the Performance of the Aceh Provincial People's Representative Council

Aula Lestari & Cut Asmaul Husna*

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar, Indonesia

Diterima: 01 Juli 2022; Direview: 02 Juli 2022; Disetujui: 21 Agustus 2022

*Corresponding Email: cutasmaulhusna@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi humas di Sekretariat DPRA dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen. Sejauh mana bidang kehumasan sekretariat DPRA telah mengembangkan fungsi kehumasan yang ada menjadi fungsi yang lebih variatif dengan tujuan meningkatkan instansi terkait juga dikaji dalam penelitian ini. Masalah difokuskan pada kinerja divisi humas sekwan DPR Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yang mana prosedur dalam penelitian yang dihasilkan berupa data yang berbentuk deskripsi yaitu kata-kata tertulis atau jawaban dari beberapa narasumber dan hasil dari observasi secara langsung dilapangan. Objek yang bersifat alamiah atau natural setting adalah objek yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang sering disebut sebagai penelitian naturalistik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Divisi Humas, Keprotokolan, dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh telah dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sekretariat Humas DPRA mengatur tugas dan fungsinya sedikit berbeda, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pembagian tugas dan fungsi humas menjadi beberapa poin yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan saling berhubungan. Tentunya humas, protokol dan publikasi berdampak dalam meningkatkan kinerja DPR Aceh namun lebih di spesifikasikan dalam hal ini konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menjalin hubungan dengan media yang bekerjasama dengan DPR Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Sekretariat Dewan; Fungsi; Hubungan Masyarakat; Kinerja

Abstract

The purpose of this study was to identify the function of public relations in the DPRA Secretariat in order to improve management performance. The extent to which the public relations sector of the DPRA secretariat has developed the existing public relations function into a more varied function with the aim of improving the relevant agencies is also studied in this study. The problem is focused on the performance of the public relations division of the Aceh Provincial DPRD. The method used in this study is a qualitative approach, where the procedures in the research produced are descriptive data, namely words or written answers from several sources and the results of direct observations in the field. Natural objects or natural settings are objects used in qualitative research which are often referred to as naturalistic research. Based on the results of the study, it can be concluded that the functions of the Public Relations, Protocol, and Publication Section of the Aceh DPR Secretariat have been carried out properly and in an orderly manner. The DPRA Public Relations Secretariat regulates its duties and functions slightly differently, but still in accordance with the applicable laws and regulations. This can be seen from the division of tasks and functions of public relations into several points, each of which has different and interconnected tasks and functions. Of course, public relations, protocols and publications have an impact on improving the performance of the Aceh DPR, but more specifically in this regard, consistency in fighting for people's aspirations and establishing relationships with the media in collaboration with the Aceh Provincial DPRD.

Keywords: House of Representatives; Secretariat of the Board; Function; Public Relations; Performance

How to Cite: Lestari.A. & Husna.C.A. (2022). Analisis Fungsi Subbagian Humas Sekretaris Dewan dalam Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 985-993.



PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi sub bagian humas sekretariat DPRA dalam menunjang kinerja DPRA. Humas sering dipahami sebagai komunikasi dua arah atau interaksi timbal balik antara organisasi dan publik dalam rangka mendukung kegiatan dan tujuan manajemen dengan mendorong tumbuhnya kolaborasi dan pemenuhan kepentingan bersama serta kelangsungan masa depan organisasi dalam jangka panjang (Assumpta, 2002; Effendy, 2006). Menurut Harlow (1978) Humas adalah fungsi manajemen khusus yang membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dan publik, mengenai kegiatan komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menangani masalah, membantu manajemen agar mampu untuk menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi munculnya masalah.

Setiap lembaga, baik instansi pemerintah maupun lembaga perusahaan, membutuhkan hubungan masyarakat atau *public relation*. Setiap instansi bersaing untuk kemajuan di bidangnya masing-masing. Suatu lembaga sangat memperhatikan hubungan antar lembaga maupun hubungan antar lembaga dengan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif serta keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat terhadap segala hal yang menyangkut lembaga dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Akibatnya, banyak institusi, baik publik maupun swasta, membutuhkan jasa profesional humas. Berdasarkan fungsi humas yang memiliki dampak signifikan terhadap institusi, departemen humas memiliki potensi masa depan yang cukup besar (Lubis, 2012; Prayoga, 2016).

Masyarakat saat ini menuntut informasi yang akurat dan transparansi dari institusi, sehingga memiliki departemen humas memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Namun, banyak orang awam percaya bahwa departemen hubungan masyarakat tidak diperlukan, dan biasanya bagi individu untuk percaya bahwa petugas hubungan masyarakat hanya peduli dengan penampilan luar. Seorang humas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan situasi baru guna memfasilitasi berkembangnya hubungan positif antar lembaga dan lembaga dengan masyarakat, sehingga terbentuk citra positif lembaga di mata masyarakat (Prasetyo, 2016; Wahyuningsih, 2014)

Informasi yang dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat umum adalah benar dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, humas harus mampu menyampaikan informasi yang menumbuhkan pemahaman publik guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Peran humas telah berkembang dari waktu ke waktu, tidak hanya membangun citra positif organisasi di mata publik tetapi juga melayani sebagai komunikator untuk kelompok eksternal dan internal. Humas harus mampu memberikan informasi kepada anggota masyarakat yang memiliki interaksi langsung maupun tidak langsung dengan lembaga serta menjaga hubungan positif antara lembaga dan organisasi eksternal. Hubungan masyarakat juga mendorong hubungan internal yang kuat, seperti interaksi yang baik antara karyawan, karyawan dan atasan, dan sebaliknya, dan hubungan masyarakat diharapkan dapat menilai dan meramalkan krisis di masa depan di lembaga terkait. (Liestianingsih & Dayanti, n.d.)

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2011) mengemukakan bahwa peran humas adalah sebagai komunikator yang membantu membuka akses dan saluran komunikasi dua arah antara departemen pemerintah dan masyarakat umum. Humas juga berperan sebagai fasilitator dalam menyerap perkembangan keadaan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. Humas pemerintah bertanggung jawab untuk menginformasikan organisasi internal dan masyarakat umum tentang kebijakan dan operasi masing-masing lembaga pemerintah. Humas pemerintah juga terlibat dalam berbagai taktik dan strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan opini publik guna menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kepentingan publik dan salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.



Dalam instansi pemerintah seperti DPR yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat harus juga diperlukan. Anggota yang menjadi wakil rakyat dipilih dalam proses pemilihan umum yang melibatkan anggota partai. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah salah satu organisasi pemerintahan di Aceh yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi proses pemerintahan eksekutif dalam penegakannya. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki sejumlah kegiatan dan fungsi sulit yang dilakukan dengan bantuan anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unit yang memberikan dukungan administratif terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sekretariat DPR Aceh juga membantu dalam penyelenggaraan rumah tangga dan keuangan DPR Aceh, serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan berbagai rapat terkait di dalamnya. Sekretariat DPR Aceh dipimpin oleh seorang sekretaris yang berhubungan langsung dengan pimpinan DPR Aceh dan dibimbing langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh (Baderan & Asiso, 2016).

Sekretariat DPR Aceh dibagi menjadi beberapa divisi yang masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mendukung kinerja DPR Aceh. Bagian Humas merupakan salah satu bagian yang berdampak signifikan terhadap kelancaran tugas dan fungsi DPR Aceh, karena DPR Aceh sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepercayaan publik dibangun di sini melalui kerja divisi humas (Purwaningsih & Herizal, 2017). Namun, humas juga memiliki tugas penting lainnya yang berperan penting dalam mendukung kinerja DPR Aceh. Penjelasan di atas didukung oleh Peraturan Gubernur Aceh No 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pasal 20 no 3: "subbagian humas, protokol dan publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPR Aceh, menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPR Aceh, merencanakan kegiatan DPR Aceh dan merencanakan keprotokolan pimpinan DPR Aceh".

Menurut penelitian Prasetyo (2016) Dalam menjalankan fungsi kehumasannya, Biro Berita Parlemen berperan sebagai pengambil keputusan yang strategis. Kepala Biro sebagai Pejabat Eselon II dalam organisasi merupakan pengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan informasi publik Keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh Kepala Biro tentunya harus disampaikan kepada Wakil dan Sekretaris Jenderal DPR RI yang merupakan pejabat Eselon I dalam organisasi tersebut. Semua keputusan, termasuk yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, harus berpedoman pada Undang-Undang dan Keputusan Presiden sebagai keputusan tertinggi dalam organisasi. Adapun menurut penelitian Al Habib & Suratman (2018) hubungan masyarakat parlemen Nganjuk merupakan penasehat ahli Humas sebagai penasehat ahli, yang berperan menampung ide atau aspirasi yang ditemukan dalam permasalahan masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. Humas berfungsi sebagai fasilitator komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Humas sebagai fasilitator pemecahan masalah, yaitu humas sebagai pihak yang mampu memberikan solusi Peran Humas dalam Meningkatkan Citra Positif Lembaga Pemerintah DPRD dalam Menyelesaikan Masalah Sosial yang Ada.

Aktivitas humas DPR Aceh banyak berhubungan dengan masyarakat, mediator antara lembaga dengan masyarakat adalah humas. Menjembatani kondisi masyarakat ke komisi terkait. Humas ikut serta dengan anggota DPR Aceh untuk melakukan reses yaitu suatu kesempatan yang diberikan dalam satu masa sidang dimana para anggota DPR Aceh untuk menemui konstituennya di daerah pemilihannya dalam rangka menyerap aspirasi dan mempublikasikan kegiatan antara lain mendokumentasi, mengkliping koran, yang memuat berita yang berhubungan dengan DPR Aceh. Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan serasi antara publik internal dengan publik eksternal dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi.

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan

organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh organisasi atas waktu tertentu dengan cara yang benar.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwasannya peran humas adalah sebagai alat penunjang kegiatan dewan mulai dari menyusun bahan komunikasi dewan serta bahan publikasi. Humas juga menjadi pelayan dewan ketika adanya kunjungan kerja dewan dimana humas lah yang mempersiapkan dan merancang segala administrasi yang dibutuhkan dewan di masa kunjungan kerja. Selain itu humas juga merencanakan segala bentuk kegiatan keprotokolan pimpinan seperti memfasilitasi seluruh kegiatan pimpinan DPRA baik kegiatan di luar kantor maupun di dalam kantor. Adapun kegiatan protokol tersebut seperti mempersiapkan tempat acara atau kegiatan pimpinan, memantau pelaksanaan acara sesuai atau tidaknya jadwal untuk kelancaran acara.

Dari keseluruhan penjelasan diatas peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai tugas dan fungsi Subbagian Humas Protokol Dan Publikasi Dalam Menunjang Kinerja DPRA di kantor Sekretariat DPRA serta menganalisis fungsi Subbagian Humas Protokol Dan Publikasi Dalam Menunjang Kinerja DPRA.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana prosedur dalam penelitian yang dihasilkan berupa data yang berbentuk deskripsi yaitu kata-kata tertulis atau jawaban dari beberapa narasumber dan hasil dari observasi secara langsung dilapangan. Objek yang bersifat alamiah atau natural setting adalah objek yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang sering disebut sebagai penelitian naturalistik. Pendekatan ini memiliki karakteristik alami yang menghasilkan data secara langsung, pemaparan yang dapat dikembangkan dari proses penelitian. Analisis dari hasil penelitian yang didapatkan cenderung lebih bersifat dan dilakukan secara analisis induktif yang mana kata-kata atau hasil yang didapatkan dari penelitian bersifat penting dan berguna (Luthfiyah, 2020; Moleong, 2012).

Sarana dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengembangkan objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Karakteristik dalam penelitian kualitatif adalah data yang bersifat fakta yang mana data tersebut didapatkan secara langsung dari narasumber dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sugiyono, 2015; Raco, n.d.)

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPR Provinsi Aceh yang beralamatkan di Jl. Tgk Daud Beureueh No.H.M, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415, serta narasumber yang bersifat formal dalam penelitian ini yaitu Kasubbag Humas, Protocol, dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh yang memberikan informasi serta berhubungan langsung dengan objek penelitian yang diteliti. Sedangkan narasumber yang bersifat informal dalam penelitian ini yaitu dua orang Staff Honorer di sekretariat DPRA yang berperan langsung dalam menunjang kinerja Dewan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Humas

Kehumasan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, humas di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Pembentukan tugas dan fungsi kehumasan di sekretariat DPR Aceh tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah tentang kehumasan. Humas sekretariat DPR Provinsi Aceh memiliki tugas yang memuat semua hal yang diatur dan dilakukan sebagai penunjang kinerja dewan seperti Pengelola Media center dan Kemitraan Media yang melaksanakan kegiatan pengelolaan seperti penyiapan materi, koordinasi dan penyusunan laporan di media center, dan media dan mengelola Media Cetak yang mengharuskan karyawan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang media cetak, seperti penyiapan materi, koordinasi, dan penyusunan laporan, untuk menjamin tercapainya publikasi kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Tugas.

Kehumasan juga melaksanakan kegiatan pengelolaan seperti penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengaduan masyarakat, dalam rangka penyaluran aspirasi



masyarakat serta kegiatan pelayanan administrasi dan penyusunan laporan pengelolaan teknologi informasi komputer dalam rangka menghasilkan data dan informasi, mengolah data berdasarkan klasifikasi, dan menyimpan file data berdasarkan permasalahan. Kehumasan juga yang membantu menerima, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mereview data objek kerja di bidang naskah rapat pimpinan, sehingga menghasilkan pembuatan naskah pidato yang digunakan dewan dalam suatu acara tertentu.

Selanjutnya staff kehumasan melaksanakan kegiatan di bidang persuratan seperti penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian untuk menghasilkan data dan informasi serta mengolah data berdasarkan klasifikasinya serta menerima, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data objek kerja di bidang informasi dan bahan publikasi untuk menghasilkan dokumen dan informasi, pengolahan data menurut klasifikasi, dan penyimpanan file data berdasarkan masalah. Humas disini juga berperan sebagai pendistribusi yang mana staff akan menerima, mencatat, menyimpan, menyusun, menyiapkan, memelihara, dan mendistribusikan benda dan bahan kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna benda kerja sehingga dokumen terdistribusi dengan baik, data diolah sesuai klasifikasinya, dan file data disimpan berdasarkan masalah. Staff kehumasan tentunya melakukan kegiatan pengelolaan seperti penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pendokumentasian guna menghasilkan dokumen dan informasi serta arsip data berdasarkan permasalahan sebagai pengelola dokumentasi.

Semua kegiatan di atas dilakukan untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan peralatan kantor yang disediakan secara efektif dan efisien. Anggota humas memiliki wewenang untuk memberikan hasil tugas kepada atasan karena semua kegiatan diawasi langsung oleh atasan. Setiap tugas diberikan kepada seorang anggota staf berdasarkan keahliannya dan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala sub bagian kembali mengkoordinir dan memonitor setiap tugas yang diselesaikan oleh staf. Peran lembaga kehumasan dalam keterbukaan informasi publik sangat strategis yaitu berupaya melindungi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, profesional, dan berwibawa. Peran lembaga kehumasan di DPR sangat penting sebagai prasyarat sebuah lembaga legislatif modern. Peran humas adalah sebagai media komunikatif yang menghubungkan institusi dengan masyarakat, sehingga menghasilkan timbal balik yang positif dan saling menguntungkan.

Keprotokolan. Protokol memainkan peran penting dalam keberhasilan acara yang diadakan baik di dalam maupun di luar Kompleks Parlemen. Personil protokol harus profesional, responsif, dan berpengetahuan. Pasalnya, protokol merupakan ujung tombak dan garda terdepan suatu instansi. Peran protokol sangat kritis dan membutuhkan perhatian, sehingga harus dikelola secara profesional. Sangat penting untuk memahami bahwa kegiatan protokol berada di garis depan. Protokol harus memainkan peran paling penting agar tamu merasa dihormati.

Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membawahi semua jenis rapat pimpinan, baik di dalam maupun di luar daerah. Protokol mempersiapkan semua persyaratan untuk rapat dewan. Protokol ini dikoordinasikan dalam melaksanakan tugasnya oleh seorang koordinator yang melapor langsung kepada kepala sub bagian. Keprotokolan DPRA berperan menyiapkan venue, menyelenggarakan kegiatan yang dipimpin DPRA dan tamu DPRA yang berkunjung, termasuk venue, penataan acara, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan protokoler. Protokol juga melakukan persiapan dan koordinasi dengan instansi terkait ketika pimpinan DPR Aceh akan menghadiri acara-acara yang dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan, selain itu protokol juga mengurus dan memfasilitasi perjalanan dinas pimpinan DPRA baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri serta mengurus dan memfasilitasi kegiatan pimpinan DPR Aceh pada acara kenegaraan. Protokol merupakan peran yang sulit sehingga memerlukan koordinasi dan tanggung jawab yang kuat untuk menjaga kehormatan anggota DPR. Untuk memberikan layanan terbaik, sebuah protokol harus memahami bagaimana mengatur suatu aktivitas. Biro Protokol dan Humas Sekretariat DPRA selalu mengutamakan terjalinnya hubungan baik dalam hubungan internasional dengan mengutamakan kehormatan dan kenyamanan.

Ruang lingkup protokol meliputi perencanaan tempat, prosedur upacara, dan prosedur kehormatan. Perencanaan tempat yang dimaksud adalah *Order of Presence*, juga dikenal sebagai *Preseance* dalam bahasa Prancis. Intinya, ini menentukan siapa yang didahulukan atau siapa yang menerima hak prioritas secara berurutan. Orang dan organisasi yang mendapat prioritas dalam urutan keutamaan adalah mereka yang mendapat prioritas karena kedudukan, pangkat, dan derajatnya, serta kedudukannya dalam negara atau masyarakat. Kita harus hati-hati mempertimbangkan aturan yang tepat, etika, kesopanan, keindahan, dan kemanusiaan dalam hal ini. Prosedur upacara di sisi lain adalah aturan untuk melaksanakan upacara di acara kenegaraan atau resmi. Upacara itu sendiri terdiri dari kelengkapan upacara dan perlengkapan untuk mendukung terselenggaranya upacara yang dihadiri oleh Pejabat Negara atau Pemerintah, bisa juga dihadiri oleh anggota masyarakat yang perlu diorganisir, serta proses penempatannya.

Terakhir, dalam setiap kegiatan prosedur atau tata kehormatan adalah memberikan pelayanan kepada Pejabat Negara atau Pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu. Tata cara menunjukkan rasa hormat dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu acara termasuk dalam pertunjukan. Secara khusus pengaturan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dapat berupa pemberian rencana tempat, pemberian berupa lagu kebangsaan dan lagu kematian jika meninggal dunia, dan penyediaan sarana untuk melaksanakan acara tersebut. Seluruh tugas protokoler dilakukan secara bergantian oleh anggota protokol sekretariat DPRD dengan menggunakan sistem piket *time sharing* dan diarahkan langsung oleh atasan yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Publikasi. Informasi mencakup berbagai jenis berita, materi sejarah, dan kegiatan yang harus diketahui publik. Salah satu kegiatan kehumasan adalah publikasi, yang digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang produk atau jasa DPRD. Tujuan dari kegiatan humas adalah untuk memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan dapat diterima oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, publikasi merupakan kegiatan menyebarkan berita yang layak dikonsumsi oleh masyarakat umum, bersama dengan bagian Humas publikasi untuk membantu agar segala bentuk informasi pemerintah dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Peran humas di DPRD merupakan wujud yang harus ada sebagai peran fungsional dalam hal menyebarluaskan informasi terkait suatu kegiatan perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, khususnya kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan publikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan citra lembaga di hadapan masyarakat. Segala bentuk media (fasilitas/saluran) yang digunakan oleh praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa di pasar humas lebih dikenal oleh masyarakat sebagai humas. Media hubungan masyarakat digunakan terutama untuk publikasi dan komunikasi. Media Kemitraan antara humas dan pers (cetak atau elektronik) yang dikenal sebagai hubungan media, hubungan pers merupakan bentuk komunikasi penting yang digunakan oleh humas (hubungan pers).

Dalam mempublikasikan berita atau pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat kehumasan publikasi menggunakan beberapa jenis media humas seperti jurnal inhouse, surat kabar, majalah dan pamphlet. Kegiatan publikasi juga menggunakan media massa seperti *website*, blog dan lembaga. Meskipun dipublikasikan di media massa secara online, kegiatan publikasi ini juga masih dilakukan dengan spanduk dan poster.

Ketiga poin yang dikemukakan di atas sangat penting dan saling mendukung dalam meningkatkan kinerja DPRD. Semua fungsi di atas dilaksanakan oleh staf yang bertugas melaksanakan kegiatan. Tentunya diperlukan alat dan bahan untuk keberhasilan dan fungsi yang dijalankan dalam proses pelaksanaan fungsi yang telah digariskan di atas. Alat dan bahan yang dibutuhkan oleh bagian humas, protokol, dan publikasi yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yang harus digunakan secara efektif dan efisien.

Kinerja

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh organisasi atas



waktu tertentu dengan cara yang benar, oleh karena itu setiap karyawan harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab yang di percayakan kepadanya.

Capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2020 dianalisis berdasarkan pengukuran kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA tahun 2020 yang telah di revisi, dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian kinerja					
			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dpra	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan DPRA yang tersusun tepat waktu	-	-	-	1 dok	1 dok	100
		Jumlah pembahasan qanun prolega yang terfasilitasi	11	12 Qanun	91,67	10 Qanun	8 Qanun	80
		Persentase kegiatan dpra yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
		Jumlah anggota dpra yang mendapatkan pelayanan medical check up	81	49 orang	60,49	81 orang	81 orang	100

Dari Tabel 1. Pengukuran Kinerja dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 setelah terjadi refocusing anggaran telah terlaksana sebesar 96%, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2019 realisasinya sebesar 92%. Jika dilihat dari persentase ini, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubag humas, protokol dan publikasi, Bapak mawardi adami. Tentang apakah sub. Bagian Humas, Protokol dan publikasi berdampak pada kinerja anggota DPRA dalam pelaksanaan Fungsi legislasi? Dari hasil wawancara sebenarnya Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRA tidak berdampak apa-apa karena peraturan daerah didasarkan pada aspirasi masyarakat yang bersumber dari permasalahan yang dilaporkan di DPRA, dan Bapemperda harus selalu menindaklanjutinya berapa pun peraturan daerah yang diajukan. Hanya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh sub bagian humas, protokol, dan publikasi. namun bukan pada kuantitas atau capaian peraturan daerah yang dihasilkan, melainkan pada kedisiplinan, khususnya keikutsertaan aktif mereka dalam Musyawarah Daerah, karena publikasinya tidak hanya dalam bentuk foto, tetapi juga dalam bentuk video.

Selanjutnya, dampak humas, protokol, dan publikasi terhadap pelaksanaan fungsi Anggaran DPRA adalah tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRA dalam pelaksanaan fungsi anggaran hampir tidak ada pengaruhnya. Kinerja anggota DPRA biasanya meningkat saat penyusunan APBA atau pembahasan anggaran karena banyak detail yang harus dipertimbangkan. Anggaran Pokir atau disebut juga dengan dana aspirasi merupakan salah satu alokasi anggaran yang terkait dengan kepentingan Anggota DPRA di Daerah Pemilihan. Padahal liputan diberikan pada setiap tahapan Pembahasan Anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan, salah satu staf Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi dengan pertanyaan "Apakah mungkin sub bagian humas, protokol dan publikasi untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan? Publikasi kegiatan dalam bentuk foto dan video, serta artikel yang menjelaskan jalannya kegiatan, akan mendorong anggota DPRA untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pengawas atas jalannya kebijakan dan program pemerintah. dengan kemampuan publikasi untuk memproyeksikan citra positif lembaga.

Temuan keseluruhan dari wawancara ini mengkonfirmasi bahwa Sub. Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi mempengaruhi kinerja anggota DPRA dengan meningkatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini juga didukung dengan temuan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada informan Sub staf. Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi berkepentingan apakah dapat meningkatkan kinerja anggota DPRA, dalam hal ini konsistensi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjalin hubungan dengan media bekerjasama dengan DPR Provinsi Aceh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Divisi Humas, Keprotokolan, dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh telah dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sekretariat Humas DPRA mengatur tugas dan fungsinya sedikit berbeda, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pembagian tugas dan fungsi humas menjadi beberapa poin yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan saling berhubungan. Sub bagian humas, protokol dan publikasi diawasi oleh seorang atasan yang membawahi staf yang menjalankan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian Humas. Atasan berwenang menegur pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan, keprotokolan, dan publikasi dengan baik. Hubungan masyarakat, protokol, dan publikasi adalah sub-bagian sekretariat DPR Aceh yang memiliki tugas dan fungsi yang kompleks serta dinilai efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan DPR Aceh. Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh telah ditata ulang sesuai dengan tugas yang harus diselesaikan. Perluasan fungsi ini membuat Humas Sekretariat DPRA semakin efektif dalam membantu kinerja DPRA. Di balik itu, Humas Sekretariat DPRA masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, meski ada beberapa variasi baru. Tentunya humas, protokol dan publikasi berdampak dalam meningkatkan kinerja DPR Aceh namun lebih di spesifikasikan dalam hal ini adalah konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menjalin hubungan dengan media yang bekerjasama dengan DPR Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al habib, D.R., & Suratman, B. (2018). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Lembaga Pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk.... PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN NGANJUK. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 06(02), 125–131. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/JPAPUNESA/article/view/32139>
- Assumpta, M. (2002). *public relation : teori dan praktik* (p. 73).
- Baderan, N., & Asiso, F. (2016). Implementasi Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance." *Lex Administratum*, 4(2).
- Harlow, (1978). *A Model for Public Relations Education for Professional Practices*.
- Liestianingsih, D., & Dayanti, M.S. (n.d.). *Modul 1 Dimensi Historis Praktik Humas*. 1–37.
- Lubis, E.E. (2012). Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 51–60.
- Luthfiah, F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). *Bandung: Rosda Karya*, 12. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2011). *Permenpan Nomor 30 Tahun 2011*.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosydakarya.
- Effendy, O.U., (2006). *human relation & public relation*. Mandar Maju.
- Prasetyo, K. (2016). Koalisi Dominan Humas DPR-RI sebagai Boundary Spanner dalam Mewujudkan Good Governance melalui Informasi Publik. *Jurnal Media Kom*, VI(2), 16–30. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_402465642075.pdf
- Prayoga, I. (2016). *Konsep dasar pr i*. https://repository.unikom.ac.id/50326/1/KONSEP_DASAR_PR_I.pdf
- Purwaningsih, T., & Herizal. (2017). Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2).
- Raco, J. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.



- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Wahyuningsih, L. (2014). Tugas Dan Fungsi Public Relation Dalam Organisasi. *Fungsi PTBBN*, 1–82.
https://eprints.uny.ac.id/17909/1/TA_ADE_SAFITRI.pdf

